

TESIS

**PENGATURAN SANKSI KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

*Diajukan guna memenuhi tugas akhir
Program Pascasarjana*

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. ELWI DANIL, S.H., M.H.
Dr. ARIA ZURNETTI, SH., M.Hum.



Disusun Oleh:

YELLI NELVIA
1620112057

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2019**

**PENGATURAN SANKSI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

(Yelli Nelvia, 1620112057, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2019)

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur. Tindak kekerasan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan merupakan ancaman nyata, baik fisik, verbal maupun emosional yang menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan terhadap anak dijumpai dalam berbagai ranah kehidupan. Kecenderungan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun menunjukkan gejala peningkatan. Di Indonesia sudah cukup banyak pengaturan terhadap hak anak baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya. Adapun Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Penelitian ini penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Rancangan KUHP tahun 2015 yang menyangkut kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang belaku telah memberikan pengaturan secara terperinci tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak termasuk pemberian sanksi bagi pelaku telah diatur secara tegas. Adanya ancaman kebiri bagi pelaku tindak pidana yang termuat dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diharapkan dapat menekan angka kejahatan terhadap pelaku, dan diharapkan tidak ada pedofila lagi yang berkeliaran di Indonesia. Sementara dalam Rancangan KUHP tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak digabung ke dalam bab Kesusilaan, tidak diatur terpisah dan ancaman yang diberikan juga belum maksimal seperti ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang perlindungan anak. Diharapkan ada perubahan dalam Rancangan KUHP agar memisahkan antara delik kesusilaan dengan perlindungan anak dan juga ancaman pidana yang diberikan diperberat lagi.

Kata Kunci: Sanksi, Kekerasan Seksual, Anak, Kebijakan Perundang-undangan

*SETTLEMENT OF CRIMINAL SANCTIONS FOLLOW SEXUAL VIOLENCE
AGAINST CHILDREN IN LEGISLATION POLICIES
IN INDONESIA*

*(Yelli Nelvia, 1620112057, Faculty of Law Post Graduate Program
Andalas University, 2019)*

ABSTRACT

One of the issues that is of concern to the government, experts and the community are cases of criminal acts of sexual violence committed by adults to minors. Violence is a fairly complex problem and is a real threat, both physical, verbal and emotional which causes serious negative impacts for the victims and their social environment. Violence against children is found in various spheres of life. The tendency of cases of violence against children from year to year shows symptoms of improvement. In Indonesia there have been enough arrangements for children's rights both in the form of legislation and other policies. The problem of research is how is the regulation of criminal sanctions for sexual violence against children in the legislation applicable in Indonesia? What are the regulations regarding criminal sanctions for sexual violence against children in the draft Criminal Code policy? The problem approach method used is normative jurid, namely the law approach taken to the Child Protection Act and also the 2015 Criminal Code Draft concerning sexual violence against children. The results of the study show that various laws and regulations that have provided detailed arrangements regarding the criminal acts of sexual violence against children, including the provision of criminal sanctions for perpetrators, have been strictly regulated. The threat of castration for offenders contained in the child protection law namely Law Number 17 of 2016 is expected to reduce crime rates against perpetrators, and it is hoped that no more pedophiles will roam in Indonesia. While in the draft Criminal Code the criminal acts of sexual violence against children are combined into the chapter on Decency, not set apart and the threats given are also not maximized as the criminal threat contained in the child protection law. It is expected that there will be a change in the Draft Criminal Code in order to separate between the decency offense and the protection of the child and also the criminal sanction given to be further aggravated.

Keywords: Criminal Sanctions, Sexual Violence, Children, Legislation Policy